

Studi Literatur: Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah-Sekolah Inklusi di Indonesia

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
M. Yudhistira Wijaya Universitas Airlangga muhhammad.yudhistira.wijaya-2023@psikologi.unair.ac.id Wiwin Hendriani Universitas Airlangga wiwin.hendriani@psikologi.unair.ac.id	ISSN: 2807-9558 Vol. 4, No. 1 April 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajup

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Wijaya, M. Y., & Hendriani, W. (2024). Studi Literatur: Implementasi Evaluasi Program Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah-Sekolah Inklusi di Indonesia. *Arus Jurnal Pendidikan*, 4(1), 1-12.

Abstrak

Seperti anak biasa pada umumnya, anak berkebutuhan khusus (ABK) juga berhak mendapatkan hak pendidikan yang sama. Dalam proses pendidikan ABK terdapat pendidikan inklusif yang berguna untuk memperlancar proses pembelajaran di sekolah umum tanpa diskriminasi. Pembelajaran ABK di sekolah negeri disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik masing-masing siswa. Untuk itu pemilihan pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien sangat diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dan tentunya akan membantu ABK kelak dalam mencapai perkembangan dan keberhasilan hidup yang optimal. Selain itu, evaluasi terhadap pendidikan ABK di sekolah inklusif sangat diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan pendidikan inklusif yang lebih baik untuk semua. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan berbagai pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas inklusif selama kegiatan belajar mengajar, bagaimana pelaksanaan pembelajaran tersebut dilaksanakan serta faktor penghambat dan pendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah inklusif. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan sumber referensi diambil dari artikel ilmiah dan berita elektronik yang telah diterbitkan.

Kata Kunci: Evaluasi Penyelenggaraan Program Sekolah Inklusi, Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus..

Abstract

Like regular children in general, children with special needs (ABK) also have the right to receive the same educational rights. In the ABK education process, there is inclusive education which is useful for facilitating the learning process in public schools without discrimination. ABK learning in public schools is adjusted to the abilities and characteristics of each student. For this reason, choosing an effective and efficient learning implementation is necessary for students to achieve learning goals and will of course help ABK later in achieving optimal development and success in life. Apart from that, evaluation of ABK education in inclusive schools is very necessary for continuous improvement in order to realize better inclusive education for all. The purpose of writing this article is to describe the various learning implementations implemented in inclusive classes during teaching and learning activities, how these learning implementations are implemented and the inhibiting and supporting factors in teaching and learning activities in inclusive schools. The method used in writing articles uses library research techniques and reference sources taken from scientific articles and electronic news that have been published.

Keywords: Implementation Evaluation of Inclusive School Program, Education for Children with Special Needs, Evaluation.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan aspek penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Sebuah sistem pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan SDM yang unggul dapat membawa dampak kemajuan bagi bangsa Indonesia. Selain sistem pendidikan yang telah diterapkan terhadap peserta didik reguler pada umumnya sejak lama, Indonesia telah menerapkan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini sejalan dengan yang tertuang dalam Undang-Undang yakni setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Indonesia, 2003). Pendidikan inklusi adalah pengembangan dari program pendidikan terpadu yang pernah dilakukan di Indonesia pada sekitar tahun 1980. Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia dimulai pada sekitar tahun 2000 (Herawati, 2010). Istilah pendidikan inklusi ini merupakan kata atau istilah yang disuarakan oleh UNESCO yang berasal dari kata *Education for All*. Pendidikan inklusif kini menjadi salah satu prioritas tertinggi dalam kebijakan pendidikan di banyak negara sejak adanya Pernyataan Salamanca UNESCO pada tahun 1994. Pendidikan inklusif dilaksanakan yang bertujuan memberikan pendekatan dan kesempatan kepada semua peserta didik tanpa terkecuali termasuk didalamnya bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan di sekolah reguler bersama-sama dengan peserta didik reguler. Dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 pasal 3 ayat 2 yang dimaksud dengan Anak Berkebutuhan Khusus, yaitu : tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berkesulitan belajar, lamban belajar, autisme, memiliki gangguan motorik, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya, memiliki kelainan lainnya, dan tunaganda.

Model pendidikan inklusi ini bukan halnya sebagai pengganti dari Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Terpadu yang selama ini melayani kebutuhan dari Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), tapi model pendidikan inklusi di sekolah-sekolah reguler merupakan sebuah pilihan alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah guna membuka fasilitas dan memudahkan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang ingin bersekolah di sekolah reguler apalagi tidak semua daerah memiliki Sekolah Luar Biasa (SLB) dan sekolah terpadu sehingga sekolah inklusi untuk memperpendek akses pendidikan bagi ABK dan yang terpenting adalah mereka tidak mengalami putus sekolah. Berdasarkan data dari UNICEF bahwa 67% Anak Berkebutuhan Khusus di

Indonesia belum mendapatkan akses pendidikan yang seharusnya. Beberapa faktor penyebabnya antara lain kemiskinan, pemerataan dan kesetaraan gender.

Menurut Dharma (2015) SLB masih menjadi tembok pemisah bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan anak-anak pada umumnya dan ini tentunya menghambat proses interaksi di antara mereka apalagi ABK menjadi kelompok yang tersingkirkan dalam interaksi sosialnya di masyarakat. Sebuah stigma yang muncul di Indonesia yakni bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) merupakan sebuah kemalangan tetapi yang terjadi yakni lingkungan sosial atau masyarakat yang membuatnya demikian. Anak Berkebutuhan Khusus biasanya memiliki kelebihan lain seperti misalnya anak yang tuna sosial biasanya lebih jenius dari kebanyakan anak-anak lainnya. Sementara dari sekolah sendiri tak jarang masih mencari bentuk bagaimana cara dalam memberikan pelayanan pendidikan inklusi tersebut. Masih terdapat guru yang tidak menyadari bahwa terdapat penyandang disabilitas di tempatnya bahkan terdapat sekolah-sekolah yang menolak jika ada anak disabilitas yang ingin masuk bersekolah di sekolah tempat mereka. Keberadaan anak berkebutuhan khusus setiap tahunnya meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017 mencatat jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia mencapai 1,6 juta. Lebih dari sejuta anak Indonesia merupakan anak berkebutuhan khusus yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memperkirakan bahwa hampir 70% anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh pendidikan yang layak. Hal ini tergolong banyak yang mana semestinya ABK mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dan layak sebagaimana mestinya.

Setiap sekolah penyelenggara inklusi memiliki guru pendamping khusus (GPK) atau *shadow teacher*. Menurut Halimah (2014) sekolah inklusi harus memiliki minimal dua GPK untuk membantu sekolah dalam melayani siswa ABK. Sejalan dengan pendapat Rahmianar (2016) menyatakan bahwa sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, sebaiknya mampu menghadirkan para pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai untuk memberikan layanan pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus. GPK merupakan guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan memiliki kompetensi dalam menangani siswa berkebutuhan khusus (Indrawati, 2013)

Sekolah inklusi merupakan salah satu solusi dalam sistem pendidikan guna untuk pemerataan dan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Pendidikan inklusi mencerminkan pendidikan yang diperuntukan bagi semua anak tanpa terkecuali baik keterbatasan secara mental, fisik, komunikasi sosial maupun finansial (Dewi, 2017). Pendidikan inklusi memberikan kesempatan bagi ABK dan non ABK untuk belajar bersama-sama di sekolah reguler sehingga dapat memunculkan potensi yang dimiliki anak tumbuh dan berkembang secara optimal namun pada penyelenggaraan sekolah inklusi, masih terdapat berbagai hal yang membuatnya tidak terlaksana dengan kondisi yang diharapkan. Sehingga hal ini menjadi sebuah hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki demi pemenuhan pendidikan serta meningkatkan mutu serta kualitas SDM untuk Indonesia yang maju di masa mendatang.

B. Metodologi

Metode yang digunakan oleh penulis di dalam artikel ini yakni teknik penelitian pustaka. Teknik penelitian kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan melihat atau mengulas penelitian terdahulu melalui membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis. (Kartini, 1998). Pada penelitian ini pencarian artikel menggunakan Google Cendekia dengan rentan publikasi mulai tahun 2013 sampai tahun 2023 dan dapat diunduh secara versi lengkap. Kata kunci yang digunakan untuk mendapatkan data yakni "pendidikan inklusif di sekolah reguler". Tahapan yang digunakan dalam kepustakaan

ini yaitu menentukan topik. Selanjutnya, mencari artikel yang sesuai dengan topik penelitian. Pemilihan artikel dilakukan melalui proses identifikasi abstrak yang berisi tujuan, subjek, metode, teknik pengumpulan data dan hasil dari penelitian. Pada tahap ini peneliti mendapati 4 (empat) artikel yang menunjukkan topik yang sesuai yang kemudian dijadikan data dan dianalisis dalam penelitian ini. Setelah proses ini, peneliti mengidentifikasi dengan melihat metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, tujuan dan hasil penelitian untuk menganalisis apa saja bagaimana implementasi dan evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran terhadap anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah-sekolah inklusi. Pada tahap terakhir, peneliti membuat pembahasan dan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Tabel 1: Artikel rujukan penulisan

Penulis	Topik	Tujuan	Hasil
(Prita Indriawati, 2013)	Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus Pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri Kecamatan Junrejo Batu	1) menggambarkan tugas guru pembimbing khusus dalam proses identifikasi, layanan penilaian dalam menyusun program pengajaran individual pendidikan inklusif di depan umum SD Junrejo Batu, 2) menggambarkan pelaksanaan tugas Khusus Guru Pembimbing pada merancang dan memberikan program yang spesifisitas pada pendidikan inklusi di depan umum SD Junrejo Batu, dan 3) menggambarkan pelaksanaan tugas khusus Guru Pembimbing dalam memodifikasi pengajaran pendidikan inklusif di depan umum SD Junrejo Batu.	Implementasi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam pelaksanaan pendidikan inklusi memerlukan sumber daya manusia dan sumber daya finansial karena belum dapat dipenuhi. Lemahnya komunikasi dalam kebijakan pendidikan inklusi menjadi masalah yang mana GPK dalam merancang dan melaksanakan program kekhususan untuk pembimbingan non-akademik bagi ABK. Modifikasi bahan ajar yang dilakukan GPK dalam bahan ajar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu ABK dikarenakan minimnya sumber daya manusia dan sumber daya finansial sehingga berdampak pada kebutuhan akses bahan ajar yang belum terlayani dengan baik.
(Niga Pratiwi, 2019)	A. Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Serang Pengasih Kulon Progo	(1) budaya inklusi yang tercipta di SD Negeri Serang, (2) kebijakan yang telah diterapkan di SD Negeri Serang, (3) implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Serang.	Terdapat tiga dimensi yang saling berkaitan, meliputi: dimensi budaya, kebijakan, dan praktik. Dimensi budaya di SD Negeri Serang yang berkaitan dengan tema penerimaan ditemukan adanya penolakan terhadap ABK oleh teman kelas. 'Kebutuhan' ABK belum bisa ditolerir menjadi faktor utama bagi teman kelas ABK untuk melakukan penolakan tersebut. Hal ini berdampak pada sikap antar teman yang kurang menghargai dan menghormati. Pada dimensi kebijakan semua fasilitas yang disediakan tidak ada masalah sehingga fasilitas tersebut dapat diakses dengan mudah oleh semua anak termasuk ABK. Dimensi implementasi menunjukkan adanya perbedaan waktu perencanaan pengajaran untuk ABK dengan anak pada umumnya. ABK mendapatkan waktu lebih panjang dari pada anak lainnya. Hal ini disebabkan ABK mendapatkan layanan khusus

Penulis	Topik	Tujuan	Hasil
(Mahasir, 2021)	Pengelolaan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Kota Padang	Mengungkapkan peran kepala sekolah dan guru, dalam pelaksanaan pendidikan inklusif semua Sekolah Dasar Negeri Kota Padang yang melaksanakan pendidikan inklusif.	berupa tambahan jam dan pengulangan materi yang dilakukan sepulang sekolah Diperlukan adanya sosialisasi terkait dengan pengetahuan pendidikan inklusi, oleh sebab itu peran kepala sekolah, peran guru, peran orang tua sangat diharapkan. Kemudian berkaitan dengan pengembangan, penyediaan bahan ajar bagi guru pendidikan inklusi harus disiapkan jauh-jauh hari. Guru juga harus dibekali dengan ilmu-ilmu yang berkaitan seputar anak berkebutuhan khusus, guru juga harus mengenal siswa secara keseluruhan baik fisik maupun psikis, guru juga harus dibekali dengan keterampilan pengetahuan dan cara mengatasi anak-anak berkebutuhan khusus.
(Jayadi & Asep Supena, 2023)	Implementasi Pendidikan Inklusi di SDN K1 Kabupaten Karawang	Memberikan deskripsi mengenai implementasi dan permasalahan dalam program pendidikan inklusi.	Implementasikan Pendidikan Inklusi walau belum optimal karena beberapa kendala, akan tetapi kepala sekolah, guru, dinas pendidikan dan masyarakat terus berupaya melakukan kerjasama untuk melakukan peningkatan implementasi Pendidikan inklusi agar dapat memberikan layanan yang tepat bagi siswa pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah dasar.

Dalam Indrawati (2013) tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu berdasarkan kebijakan Permendiknas No 70 tahun 2009 junto Pergub Jatim No 6 tahun 2012 tentang tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan inklusif meliputi: identifikasi, asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI). Merancang dan melaksanakan Program kekhususan dan yang terakhir yaitu memodifikasi bahan ajar.

Pada tugas yang pertama yakni proses identifikasi, asesmen dan menyusun Program Pembelajaran Individu (PPI). Pada proses identifikasi dilakukan untuk menemukan dan mengenali anak yang terkategori berkebutuhan khusus. Proses identifikasi yang dilakukan di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo dilakukan oleh sebagian besar Guru Pembimbing Khusus (GPK) dan hanya beberapa sekolah yang dilakukan oleh guru reguler dan itu bukanlah sebuah hal yang keliru. Namun nampak ketimpangan sebab identifikasi dilakukan setelah kegiatan pendidikan (inklusif) telah berlangsung dan siswa yang terindikasi ABK tersebut langsung diarahkan pada kelas khusus berbeda dengan sekolah yang sebagian besar memiliki GPK dalam mengidentifikasi ABK dilakukan dengan melihat gambaran fisik siswa dan dilanjutkan dengan memberikan tes akademik (baca, tulis dan hitung) beserta tes IQ dan dilakukan oleh pihak-pihak profesional nantinya seperti psikolog dan terapis jika GPK tidak mampu melakukan identifikasi secara mandiri

Tugas yang kedua yakni merancang dan melaksanakan program kekhususan yang ditujukan untuk memberikan program pelayanan sesuai karakteristik kekhususan ABK. Pada dasarnya program kekhususan bagi ABK merupakan program

pembimbingan non-akademis bagi ABK. Sehubungan dengan cakupan tersebut, ada perbedaan persepsi dalam pemaknaan terhadap program kekhususan oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. Ada Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang memaknai program kekhususan sebagai program khusus ditujukan untuk pembelajaran bagi ABK dalam kelas khusus (intrakurikuler). Disisi lain, terdapat pula Guru Pembimbing Khusus (GPK) yang sejatinya sudah memahami konsepsi program kekhususan sebagai bina non-akademis bagi ABK.

Selanjutnya dalam memodifikasi bahan ajar berdasarkan kebutuhan ABK sebagai upaya modifikasi tersebut berpedoman pada dalam silabus kelas reguler. Dalam proses pembelajaran, GPK menggunakan media peraga berupa gambar, kartu gambar, dan lain-lain. Implementasi tugas tersebut tercermin dalam pemilihan media pembelajaran bagi anak dengan disesuaikan dengan materi pelajaran. Untuk mata pelajaran berhitung dengan menggunakan alat peraga seperti dakon. Untuk mata pelajaran membaca dengan menggunakan word card, agar ABK mudah dalam mengeja kata perkata.

Indrawati (2013) dalam penelitisnys mendapati kendala yang dihadapi Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu dalam proses identifikasi siswa ABK antara lain kendala yang dimaksud dapat bersifat eksternal dan internal. Kendala eksternal berkaitan dengan partisipasi orang tua ABK yang relatif kurang maksimal dalam memberikan informasi yang valid dan reliabel. Ada kecenderungan orang tua menyembunyikan "kebutuhan khusus anak" secara sadar karena aspek kultural yang cenderung konservatif. Kendala-kendala eksternal lainnya yang juga menghambat proses identifikasi adalah keterbatasan ekonomi orang tua ABK. Kendala internal yang dihadapi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam implementasi tugasnya ketika mengidentifikasi ABK berkaitan dengan kompetensi Guru Pembimbing Khusus (GPK) itu sendiri. Dengan melihat kondisi sosial masyarakat yang ada juga berpengaruh dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yang Guru Pembimbing Khusus (GPK) harusnya dibekali dengan kompetensi tambahan untuk dapat melakukan klasifikasi ABK sehingga membutuhkan biaya lebih banyak baik dari GPK dan wali siswa yang ingin masuk sekolah. Disamping kendala yang dihadapi Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam pelaksanaan identifikasi, dalam penelitian ini juga ditemukan adanya bias konsepsi dalam pemahaman Guru Pembimbing Khusus (GPK) antara kelas khusus, kelas inklusif dan kelas reguler. Kelas inklusif lebih dimaknai sebagai kelas bagi para ABK (mestinya kelas khusus), sedangkan kelas reguler dimaknai sebagai kelas bagi siswa pada umumnya. Artinya, tidak ada penyatuan kelas antara ABK dengan siswa reguler sehingga implementasi inklusivitasnya masih terasa canggung. Dengan kata lain, tidak ada kelas inklusif pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu. Ada kecenderungan bahwa pendidikan inklusif hanya ditujukan bagi siswa special needs (ABK). Dengan demikian, pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu belum mencakup siswa gifted/ talented. Pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu seolah hanya ditujukan bagi siswa yang memiliki kebutuhan khusus bernada minor. Sementara siswa gifted/ talented seolah "ditelantarkan" di kelas reguler. Hal tersebut tidak sesuai dengan hakikat tujuan pendidikan inklusif yang tercantum dalam kebijakan Permendiknas No. 70 tahun 2009 (pasal 2 dan 3) junto Pergub Jatim No. 6 tahun 2011 (pasal 2).

Tugas Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo – Batu tidak terimplementasi karena adanya beberapa kendala. Guru Pembimbing Khusus (GPK) menjembatani kesenjangan tersebut dengan memodifikasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Inklusif. Kendala tersebut antara lain Jumlah indikator tersebut cukup banyak sehingga Guru Pembimbing Khusus (GPK) membutuhkan waktu penyusunan yang cukup lama. kurang memahami konsep penyusunan Program Pembelajaran Individual (PPI) sebab pada umumnya latar belakang akademis Guru Pembimbing Khusus (GPK) belum mencakup kompetensi pedagogik. terbatasnya

pendampingan dari Dinas terkait dalam bimbingan dan penyuluhan mengenai Program Pembelajaran Individual (PPI). Selain itu masih terdapat bias pemahaman mengenai konsepsi pendidikan inklusif selain itu keterbatasan waktu dan tenaga pendidik Guru Pembimbing Khusus (GPK) pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu baru difokuskan pada kegiatan akademis yang mencakup pembelajaran bagi ABK dan tidak dibarengi dengan upaya eksplorasi kemampuan bidang non akademis melalui program kekhususan.

Dalam memodifikasi bahan ajar ada beberapa kendala yang dihadapi Guru Pembimbing Khusus (GPK), yaitu: pertama keterbatasan dana bantuan operasional. Dana operasional bagi ABK masih disamakan dengan siswa pada umumnya, padahal pada tataran operasional kebutuhan keduanya berbeda. Kedua, belum tersedianya alat peraga dan buku pelajaran khusus bagi ABK pada pendidikan inklusif di SD Negeri se-kecamatan Junrejo – Batu. Alat peraga dan buku pelajaran yang tersedia masih belum mampu mengakomodir kekhususan ABK. GPK membuat sendiri media pembelajaran dengan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran ABK. Hal tersebut seiring dengan terbatasnya sumber daya finansial bagi modifikasi bahan ajar. Ketiga, minimnya penguasaan kompetensi pedagogik oleh Guru Pembimbing Khusus (GPK) karena latar belakang akademik yang belum linear.

Pratiwi (2019) implementasi pendidikan inklusif di sekolah dalam penelitiannya membagi implementasi pendidikan inklusif di SD Negeri Serang Pengasih Kulon Progo menjadi tiga yakni implementasi pendidikan inklusif pada dimensi budaya, implementasi pendidikan inklusif dalam dimensi kebijakan dan implementasi pendidikan inklusif dalam dimensi implementasi. Berdasarkan hal tersebut berdasarkan instrumen *Index for Inclusion* untuk mengembangkan sekolah inklusif. Inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berprinsip untuk mengembangkan pendidikan, kebijakan, dan praktik yang dapat mempengaruhi semua orang. *Index for Inclusion* memiliki tiga dimensi, meliputi: membentuk atau menciptakan budaya inklusif, menghasilkan kebijakan terkait inklusif, dan mengaplikasikan inklusif dalam praktik (Booth & Ainscow, 2012). Pada tiap dimensi memiliki aspek-aspek yang dapat dijadikan sebagai langkah-langkah pengembangan pendidikan inklusif.

Pada dimensi budaya, seluruh warga sekolah harus saling menerima dan berkolaborasi agar dapat membentuk dan/atau menciptakan budaya inklusif. Budaya inklusif memiliki dua aspek. Aspek pertama yakni membangun masyarakat secara aktif untuk saling membantu dan mendukung. Pada dimensi kebijakan, dukungan kebijakan diperlukan untuk mewujudkan pendidikan inklusif di sekolah. Dimensi kebijakan memiliki dua aspek. Aspek pertama yakni mengembangkan sekolah untuk semua, sekolah yang mampu menyediakan fasilitas yang aksesibel terhadap kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan mampu menerima keberagaman tanpa memandang ras serta warna kulit. Pada dimensi implementasi, mewujudkan praktik pengaplikasian inklusif di sekolah. Dimensi implementasi memiliki dua aspek. Aspek pertama yakni belajar bersama dalam perbedaan. Setiap pendidik dan/atau kependidikan harus dapat memenuhi kebutuhan anak didik agar dapat membantu optimalisasi kemampuan yang dimiliki anak didik. Aspek kedua yakni penerangan sumber daya. Aspek ini fokus terhadap pemberian apresiasi terhadap anak berkebutuhan khusus agar dapat di terima di lingkungan sekolah (Booth & Ainscow, 2012).

Pada dimensi budaya yang ditemukan peneliti tersebut dalam penelitiannya Dimensi Budaya Berdasarkan temuan di lapangan, ditemukan bahwa Penerapan pendidikan inklusif justru belum semuanya sesuai dengan indeks inklusi (Praptiningrum, 2010). terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pendidikan inklusif di SD Negeri Serang terutama pada tema penerimaan. Anak berkebutuhan khusus yang terdaftar di sekolah tersebut mendapatkan perlakuan diskriminasi. Perlakuan diskriminasi ini muncul dari teman kelas anak berkebutuhan khusus tersebut. Bentuk perlakuan diskriminasi yang diterima oleh anak berkebutuhan khusus di SD Negeri Serang berupa ejekan dan dikucilkan atau didiamkan (Yatim & Yanti,

2017). Melihat keadaan yang terjadi demikian, salah satunya berkolaborasi (Wijayanti, 2016). Kolaborasi yang dilakukan SD Negeri Serang, Pengasih yaitu dengan melibatkan para pendidik dan orangtua/wali. Terlibatnya orang terdekat dari anak tersebut dalam mengembangkan sikap positif baik terhadap pelajaran maupun lainnya, akan memudahkan anak tersebut dalam menangkap sesuatu yang diajarkan (Retnaningtya & Paramitha, 2015). Sehingga kolaborasi ini sangat penting dilakukan di sekolah yang telah menerapkan pendidikan inklusif. Tapi dengan adanya kolaborasi tersebut ternyata tidak cukup untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dikarenakan kurang maksimalnya kolaborasi antar sekolah dengan orangtua/wali untuk selalu mendampingi anak dalam pelajaran selama anak berada di rumah. Kenyataan yang ditemukan di lapangan ialah anak berkebutuhan khusus selalu lupa untuk mengerjakan tugas rumah yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, perhatian orangtua/wali sangat diperlukan agar anak lebih merasa dihargai keberadaannya (Tarnoto, 2016).

Selain kolaborasi dengan orangtua/wali, pihak sekolah hendaknya melakukan kolaborasi dengan Guru Pembimbing Khusus (GPK). Sebab, dengan adanya GPK akan memudahkan guru kelas dalam menjelaskan materi ke anak berkebutuhan khusus (Falatansya, 2018), namun kenyataannya, di SD Negeri Serang Pengasih belum ada GPK sehingga penanganan anak berkebutuhan khusus di sekolah tersebut masih sangat kurang. Pihak sekolah juga memberikan nasihat pada teman kelas ABK agar terwujudnya sikap-sikap yang positif seperti: saling menghormati dan saling membantu terhadap sesama. Sikap tersebut ini tidak hanya ditujukan terhadap teman sebaya saja, namun terhadap tenaga pendidik/kependidikan lainnya juga. Pendidikan di sekolah belum mampu membentuk secara keseluruhan pribadi lulusan yang dapat menggambarkan karakter dan budaya bangsa, hal ini disebabkan akibat pendidikan yang masih menitikberatkan dan memfokuskan pada capaian belajar anak secara kognitif (Suyitno, 2012). Hal ini sesuai, karena berdasar pada temuan di lapangan yang telah dijabarkan di atas, memang menuntut semua anak didik untuk memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang telah ditentukan sekolah.

Dimensi kebijakan yang terjadi yakni menambah jam belajar anak yang memiliki kebutuhan khusus yang berguna sebagai pendukung potensi anak untuk mengejar ketertinggalan dan mendapatkan pemahaman terkait pembelajaran yang telah diajarkan sebelumnya (Yuliawan, 2017). Selain itu interaksi anak ABK dengan teman kelas maupun dengan guru kelas masih mengalami kesulitan sehingga mereka cenderung tidak dapat mengeluarkan gagasan dan ide yang mereka punya oleh karena itu perlunya program tambahan dari sekolah guna meningkatkan rasa percaya diri anak dan kemampuan berinteraksi seperti pergantian tempat duduk dan pembelajaran yang berkelompok. Sebab, hal ini akan menuntut anak untuk mengeluarkan gagasan atau pikirannya terkait hal yang sedang dibahas dan dapat mengurangi tingkat bullying.

Dimensi implementasi menjadi catatan selanjutnya yang mana masih kurangnya tenaga ahli yakni Guru Pendamping Khusus (GPK) yang seharusnya menjadi hal pokok dalam penerapan pendidikan inklusif dan yang terjadi di SD Negeri Serang tidak tersedia ruangan khusus untuk penanganan ABK, tidak terdapat tenaga psikologi/bimbingan dan konseling, kurangnya sosialisasi bagi masyarakat disekitar lingkungan sekolah. Juga kurangnya pengetahuan bagi guru reguler tentang ABK yang menjadikan itu semua tidak terlaksananya program sekolah inklusif secara optimal. Selaras dengan itu semua sekolah belum mampu untuk melaksanakan kebijakan asesmen secara mandiri dikarenakan belum semua guru memiliki kemampuan pendidikan inklusif. SD Negeri Serang melaksanakan kerjasama dengan sekolah lain.

Pembelajaran belum terpusat ke anak menjadi permasalahan berikutnya, Berdasarkan temuan di lapangan, pembelajaran belum berpusat pada anak. adalah suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa secara optimal untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang (Andrianti, 2014). Proses pembelajaran berpusat pada anak dapat membantu guru dalam perencanaan pembelajaran (Suwarjo,

Maryatun, & Kusumadewi, 2012). Berdasarkan temuan pembelajaran dibuat secara responsif terhadap perbedaan tiap-tiap anak (Sunanto & Hidayat, 2016). Hal ini bertujuan untuk meyakinkan kepada anak didik baik yang memiliki hambatan ataupun tidak, bahwa pendidikan hendaknya adil dan tidak diskriminatif, serta peka terhadap semua budaya dan relevan dengan kehidupan sehari-hari anak. Tenaga pendidik/kependidikan, dan semua anak sebagai masyarakat sekolah menghargai berbagai perbedaan.

Dalam Mahasir (2021) dalam penelitian yang dilakukannya menunjukkan bahwa ABK pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar berjumlah 534 orang dan pada jenjang Sekolah Menengah pertama berjumlah 255 orang, secara keseluruhan berjumlah 789 orang dan untuk memenuhi syarat ABK di sekolah diperlukan Guru Pembimbing Khusus (GPK) sekitar 263 orang apabila masing-masing menangani tiga orang ABK. Pengelolaan pendidikan inklusi yang berkualitas memerlukan manajemen pendidikan yang berkualitas juga. Terdapat kekurangan di pihak manajerial yakni Dinas Pendidikan maupun guru sebagai tenaga pendidik yang sebagian belum memahami konsep serta belum mampu memanfaatkan kurikulum yang dirancang bagi ABK di sekolah inklusi (Ganda, 2009), di dalam manajemen pendidikan inklusi juga membutuhkan waktu dari guru untuk mempersiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan setiap anak selain itu dalam pelaksanaan manajemen pendidikan inklusi membutuhkan komitmen, visi yang jelas dan pengembangan staf.

Dalam pengelolaan pendidikan inklusi membutuhkan tanggung jawab yang utama (key person) dalam hal ini berada pada kepala sekolah (school principal) karena melaluinya faktor kunci efektif dan tidaknya suatu sekolah dan memainkan peran penting dalam keseluruhan spektrum pengelolaan sekolah. Pengelolaan pendidikan inklusi di sekolah reguler memerlukan dukungan teknis terutama bagi anak dengan kecacatan khusus seperti autisme, tuna netra, tuna grahita dan tuna rungu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyiapkan institusi yang membantu sekolah reguler penyelenggara pendidikan inklusif, berupa pusat sumber orang tua, keluarga, masyarakat, sekola, pemerintahan dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang luas, mendapatkan pelatihan berbagai keterampilan, memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan pendidikan inklusif. Pelaksanaan program hubungan masyarakat dalam sekolah inklusi dilakukan dengan menjalin komunikasi dua arah simetris yang baik dan rutin dengan pihak yang berkepentingan dengan mengedepankan sikap yang ramah an menggunakan berbagai media, membentuk pokja sekolah inklusi, melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah memberikan dukungan dan motivasi kepada para praktisi.

Pelaksanaan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Kota Padang sudah berjalan dengan baik, tetapi perlu ada penyempurnaan, seperti perlu sumber daya manusia yang mumpuni, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, menyesuaikan kurikulum materi pelajaran dan yang lebih sulit adalah mensosialisasikan program agar dapat diterima oleh berbagai kalangan. Pelaksanaan pendidikan inklusi membawa individu yang kurang beruntung ke dalam masyarakat yang selama ini mereka terpisahkan oleh mayoritas masyarakat karena dianggap berbeda, di antara mereka ada yang mengalami gangguan penglihatan, gangguan sensori pendengaran, hambatan perkembangan intelektual, hambatan fisik dan motorik, gangguan emosi dan perilaku, anak berbakat, tuna ganda, autis gangguan konsentrasi dan perhatian yang belum mendapatkan layanan pendidikan dan termarjinalkan.

Pengelolaan pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Negeri Kota Padang secara manajerialnya berjalan baik dan berkelanjutan termasuk kategori baik dan berkelanjutan termasuk kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian mendapati hasil bahwa belum berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan bahwa dalam aspek-aspek tertentu masih tergolong cukup, seperti perencanaan, pengetahuan pendidikan inklusi, arah pembinaan dan kebijakan persiapan guru. Untuk aspek visi dan misi serta kesiapan

pelaksanaan tugas tergolong baik. Pengorganisasian pendidikan inklusi bagi ABK di SD Negeri Kota Padang masih belum terlaksana secara optimal, misalnya dalam membangun interaksi masih kurang. Dalam kegiatan organisasi, koordinasi, integrasi peserta didik, sinkronisasi pembelajaran, kerja sama dan keterbukaan alam kategori cukup. Pelaksanaan pendidikan inklusif masih sebatas cukup baik, hal ini terlihat dari capaian aspek-aspek yang ada semuanya hanya tergolong cukup, oleh sebab itu perlu ditingkatkan. Pengawasan pendidikan inklusif masih sebatas cukup baik, hal ini terlihat dari semua aspek hanya tergolong cukup, oleh sebab itu perlu ditingkatkan lagi.

Dalam Jayadi & Supena (2023) dalam penelitiannya di SDN K1 Kab Karawang peserta didik berjumlah 9 orang dan proses penerimaan yang dilakukan pada peserta didik ABK dan peserta didik reguler yakni sama hanya saja yang menjadi tambahan bagi peserta didik ABK yakni proses identifikasi dan asesmen yang dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi Pendidikan Luar Biasa dan bekerja sama dengan guru kelas guna mengetahui peserta didik yang diduga mengalami disabilitas/kebutuhan khusus kemudian untuk membantu para guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan program layanan kebutuhan khusus yang tepat. Sekolah menerapkan model kurikulum duplikasi dan modifikasi. Model kurikulum duplikasi yakni kurikulum untuk PDBK (peserta didik berkebutuhan khusus) yang disamakan dengan kurikulum peserta didik reguler sedangkan model kurikulum modifikasi adalah kurikulum reguler yang diubah agar sesuai dengan kemampuan PDBK.

Dalam pembelajaran, sekolah tersebut mengakomodasi segala pembelajaran dengan memberi peluang pada PDBK untuk berpotensi pada bidangnya, mengembangkan kecerdasan majemuk, mempertimbangkan multisensori, multimedia dan multi sumber, adanya motivasi dan penerimaan guru dan antar peserta didik, mengajar untuk seluruh peserta didik, mengajarkan cara belajar dan mempertimbangkan ketahanan belajar peserta didik. Di dalam kelas, PDBK dalam menerima pembelajaran dilaksanakan bersamaan dengan anak normal dan ditempatkan di paling depan agar guru bisa mengontrol dan memberikan pelayanan optimal kepada PDBK dan pada hari-hari tertentu PDBK menerima pembelajaran di ruang kelas khusus oleh mereka yang memiliki kompetensi PLB dan guru yang sudah mengikuti diklat Pendidikan Inklusi. Pendekatan kolaborasi dan kooperatif digunakan oleh guru untuk mengembangkan pemahaman peserta didik menghubungkan konsep yang sedang dipelajari dengan kondisi yang nyata di dunia kehidupan.

Penetapan naik kelas dan kelulusan bagi PDBK ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan catatan: 1) Capaian minimal ketuntasan pembelajaran dan nilai sikap/perilaku minimal baik, tidak berlaku pada peserta didik berkebutuhan khusus; 2) Kehadiran. Begitupun format rapor dan ijazah bagi PDBK menggunakan yang berlaku di satuan pendidikan sebagaimana yang berlaku pada peserta didik reguler. Ketentuan ijazah PDBK antara lain: 1) Dikeluarkan oleh kepala satuan pendidikan dimana peserta didik belajar 2) blangko ijazah sama dengan peserta didik lainnya. 3) ijazah dapat digunakan untuk melanjutkan ke satuan pendidikan dan jenjang yang lebih tinggi. 4) kepala satuan pendidikan menyertakan surat keterangan tambahan ijazah yang mencantumkan jenis hambatan PDBK.

Sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah antara lain memiliki 1 ruang khusus untuk pembelajaran PDBK, media pembelajaran guna menunjang PDBK juga disediakan dan itu semua didapat dari bantuan pemerintah juga yang terpenting sarana penunjang fisik juga disediakan ubin taktil/guiding block di sepanjang jalan sekolah yang berguna sebagai panduan berjalan untuk pejalan kaki penyandang disabilitas terutama tunanetra dan tersedianya pegangan rambut/handrail. Terakhir bagi orangtua/wali siswa, sekolah selalu berupaya untuk melibatkan masyarakat termasuk orangtua wali siswa yang tergabung dalam Komite Sekolah termasuk untuk menangani siswa ABK. Tetapi dikarenakan keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai stigma buruk yang masih melekat pada ABK dengan masih adanya anggapan anak ABK sering

mengganggu pada saat proses pembelajaran berlangsung sehingga orangtua wali hanya mempercayakan saja semua pada pihak sekolah.

Pada penelitian tersebut juga dijelaskan bahwa dari hasil yang didapatkan bahwa implementasi pendidikan Inklusi di SDN K1 Kabupaten Karawang sudah selaras dengan konsep pendidikan inklusi dalam teori dan penelitian sebelumnya. Terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi pendidikan inklusi di sekolah tersebut. Pada faktor pendukung didapati bahwa adanya kerjasama antara kepala sekolah, guru, teman sebaya hingga dinas pendidikan dan tentunya masyarakat dalam mendukung berjalannya program pendidikan inklusi sehingga terciptanya program pendidikan inklusi yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Faktor penghambat yang dihadapi antara lain masih ada pandangan masyarakat bahwa ABK sulit ditangani sehingga muncul komplain dari beberapa orang tua murid yang keberatan anaknya berada di satu kelas dengan ABK. Selain itu masih kurangnya pengetahuan penanganan anak ABK dikarenakan pada umumnya guru yang terdapat di sekolah sebagian besar dari program studi pendidikan guru sekolah dasar sehingga memiliki keterbatasan informasi mengenai penanganan ABK secara spesifik. Adapun faktor penghambat lainnya yakni kurikulum yang belum berorientasi disusun untuk program sekolah inklusi sehingga memunculkan kesulitan tersendiri bagi pendidik disamping itu sarana pendukung di sekolah belum cukup memadai untuk memfasilitasi ABK.

D. Kesimpulan

Guna menunjang pendidikan yang merata dan terjangkau bagi semua peserta didik termasuk bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) maka hadirilah sekolah inklusif yang menjawab kebutuhan. Pendidikan inklusi yang dilaksanakan pada sekolah inklusi diharapkan dapat memberikan pelayanan yang tepat bagi siswa reguler dan pada anak ABK sebagai upaya dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan di Indonesia bagi setiap peserta didik. Tetapi dalam pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh sekolah inklusi masih memiliki kekurangan dan belum optimal karena beberapa kendala yang telah dijelaskan oleh penelitian-penelitian diatas. Untuk itu perbaikan dan mencari setiap solusi dalam menangani setiap hambatan dan rintangan yang terjadi pada pelaksanaan program pendidikan inklusi menjadi mutlak dilakukan antara lain; Pelatihan dan juga workshop mengenai penanganan ABK pada guru-guru senantiasa harus terus dilakukan sebagai upaya meningkatkan mutu implementasi program pendidikan inklusi dan tentunya guru di sekolah-sekolah inklusi sangat diharapkan mempunyai Guru Pembimbing Khusus (GPK), sosialisasi harus terus dilakukan untuk memberikan edukasi dan pemahaman pada peningkatan kesadaran terhadap masyarakat terlebih lagi kepada orangtua peserta didik dan peserta didik reguler mengenai peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus, selanjutnya yang tidak kalah penting yakni pengembangan secara bersama-sama pada model kurikulum bagi sekolah inklusif sangat diperlukan antara sekolah dengan dinas pendidikan dan kelengkapan sarana prasarana pendukung diperlukan sekolah inklusi dalam proses belajar-mengajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di sekolah inklusif di seluruh Indonesia.

E. Referensi

- Andrianti, S. (2014). Pendekatan Pembelajaran Berpusat Pada Siswa Dalam Pendidikan Agama Kristen Sebagai Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Antusias*, 3(5), 86–102.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2017). *Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB dukung Pendidikan Inklusi*.

- Booth, T., & Ainscow, M. (2012). Index for inclusion developing learning and participation in schools editing and production for CSIE Mark Vaughan CSIE supporting inclusion challenging exclusion. (2002). Retrieved from <http://csie.org.uk/resources/translatio ns/IndexEnglish.pdf>
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2).
- Dewi, N. K. (2017). Manfaat Program Pendidikan Inklusi untuk AUD. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6 (1), 12-19. doi:<https://doi.org/10.21831/jpa v6i1.15657>.
- Halimah, N. (2014). Pelaksanaan Pengembangan Diri di SMP Negeri 23 Padang (Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif). *Jurnal Penelitian Pendidikan Khusus*, 3(3).
- Herawati, N. I. (2010). Pendidikan Inklusif. *EduHumaniora* 2(1) DOI: 10.17509/e hv2il.2775.
- Indonesia, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pub. L. No. Nomor 20 (2003).
- Indrawati, Prita. (2013). Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 1 (1). Hal 50.
- Jayadi & Supena, A. (2023). Implementasi Pendidikan Inklusi di SDN K1 Kabupaten Karawang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(1): 727.
- Kartono, K. (1998). *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, hlm.78.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi.
- Praptiningrum, N. (2010). *Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*.
- Pratiwi, N. A. (2019). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Serang Pengasih Kulon Progo. *Jurnal Widia Ortodidaktika*, 8(10), 1014-1024.
- Rahmaniar, F. A. (2016). Tugas Guru Pendamping Khusus (GPK) Dalam Memberikan Pelayanan Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus Di 5 Sekolah Inklusif SD Negeri Giwangan Yogyakarta. *Widia Ortodidaktika*, 5(12), 1252-1263
- Suwarjo, Maryatun, I. B., & Kusumadewi, N. (2012). Penerapan Student Centered Approach pada Pembelajaran Taman Kanak-Kanak Kelompok B (Studi Kasus di Sekolah Laboratorium Rumah Citta). *Jurnal Pendidikan Anak*, 1.
- Suyitno, I. (2012). Pengembangan Pendidikan Karakter Dan Budaya Bangsa Berwawasan Kearifan Lokal. *Pendidikan Karakter*, 2(1), 1-13.
- Tarnoto, N. (2016). Permasalahan Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif. *Humanitas*, 13(1), 50-61.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Paris: UNESCO.
- United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Indonesia.
- Yatim, Y., & Yanti, M. (2017). *Bentuk perlakuan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi sd negeri 52 kuranji kecamatan kuranji*. Sosiologi, 1-11. Retrieved from file:///C:/Users/Dell/Downloads/MhN SeFs9kX0EtHsJ2W9HuedK5ZHYx avxPSUKqBb (2).pdf
- Yuliawan, E. R. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus Sekolah Inklusi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6.